

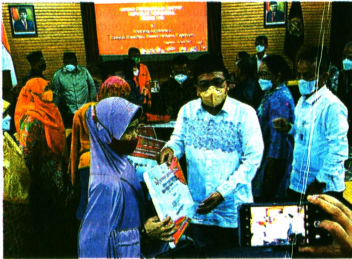


Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 19 April 2022

Halaman: 5



PENYERAHAN SIMBOLIS - Kemensos dan Komisi VIII DPR RI melakukan penyaluran BLT minyak goreng secara simbolis di Yogyakarta, Senin (18/4).

Realisasi Penyaluran BLT Migor DIY Sentuh 58 Persen

YOGYA, TRIBUN - Realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga minyak goreng di DI Yogyakarta telah menyentuh 58 persen. Total sasaran sebanyak 337.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

Sekretaris Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Benny Sujanto, menjelaskan, BLT minyak goreng disalurkan untuk bulan April, Mei, dan Juni 2022 dan akan diberikan sekaligus secara tunai sehingga seti-

ap penerima akan mendapat bantuan Rp 300 ribu.

"Di Yogya sudah 57 persen dan sekarang ada penambahan 18 persen. Itu terus bergerak dan tanggal 21 April kita konsolidasi bisa mencapai 90 persen," terangnya usai menghadiri acara penyaluran bantuan secara simbolis di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (18/4).

Pihaknya berharap agar proses penyaluran itu dapat terselesaikan sebelum Lebaran tiba. Sebab, bantuan tersebut bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin menjelang Lebaran.

"Karena untuk membantu meringankan beban pengeluaran KPM masyarakat miskin di dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri," jelasnya.

Selain menyalurkan BLT minyak goreng, Kemensos juga melakukan penyerahan bantuan secara simbolis senilai Rp401 miliar untuk Provinsi DI Yogyakarta. Bantuan terdiri dari program reguler seperti Program BPNT/

Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kemensos maupun Pemda DIY untuk melakukan pengawasan sehingga tak ada penyelewengan terkait penyaluran BLT minyak goreng. Hal ini lantaran masyarakat miskin sangat terbebani kenaikan harga minyak goreng kemasan maupun curah.

Pihaknya juga meminta agar proses penyaluran da-

pat diselesaikan sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Hal itu sesuai dengan janji Mensos yang diutarakan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

"Waktu rapat kerja dengan Kemensos saya sampaikan bahwa data itu harus akurat dan tidak boleh ada pemotongan. Jadi yang berhak menerima harus menerima dan yang tidak berhak jangan menerima. Bu menteri juga janji sebelum Lebaran harus tersalurkan semua," terangnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005